SOCIAL MEDIA, *DISTRUST IN GOVERNMENT* PADA MAHASISWA: STUDI KUALITATIF

Annisa Nadya Evelina[1], Indriyani Santoso[2]
[1,2]Universitas Negeri Padang, Indonesia
Email: nadyaevelina07@student.unp.ac.id

Abstrak

Maraknya isu politik di Indonesia sepanjang 2025–2026 yang ramai dibicarakan di media sosial menimbulkan pertanyaan mengenai kepercayaan mahasiswa terhadap pemerintah (*trust in government*). Penelitian ini bertujuan menggambarkan *trust in government* pada mahasiswa dan tema-tema yang melatarbelakanginya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner pertanyaan terbuka (*open ended question*) kepada 124 mahasiswa yang dipilih secara *purposive* dan aktif mengikuti informasi pemerintahan di media sosial, lalu dianalisis dengan analisis tematik menggunakan NVivo. Sebanyak 225 kode awal digabungkan menjadi 84 *node* dan menghasilkan tiga tema emergen, yaitu dampak psikologis *trust in government*, kondisi emosional *trust in government*, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah (*distrust in government*). Kecemasan (49 kemunculan) dan kesedihan menonjol sebagai dampak psikologis, kekesalan (28 kemunculan) menjadi emosi yang paling sering muncul, sedangkan ketidakpercayaan (96 kemunculan) disertai sikap waspada dan skeptis. Temuan menunjukkan bahwa paparan berita negatif tentang pemerintah di media sosial berkaitan dengan menurunnya kepercayaan mahasiswa, yang direspons dengan upaya memverifikasi informasi secara lebih cermat.

Kata Kunci: *Trust in Government, Distrust in Government, Media Sosial, Mahasiswa, Kualitatif.*

Abstract

The prevalence of political issues in Indonesia throughout 2025–2026, which were widely discussed on social media, raised questions about college students' trust in the government. This study aims to describe college students' trust in the government and the underlying themes. The study employed a qualitative approach. Data were collected through a questionnaire with open-ended questions administered to 124 students who were purposively selected and actively followed government-related information on social media; the data were then analyzed using thematic analysis with NVivo. A total of 225 initial codes were consolidated into 84 nodes, yielding three emergent themes: the psychological impact of trust in government, the emotional state related to trust in government, and distrust in government. Anxiety (49 occurrences) and sadness stood out as psychological impacts; frustration (28 occurrences) was the most frequently expressed emotion; while distrust (96 occurrences) was accompanied by wariness and skepticism. The findings indicate that exposure to negative news about the government on social media is associated with a decline in students' trust, to which they respond by making efforts to verify information more carefully.

Keywords: *Trust in Government, Distrust in Government, Social Media, University Students, Qualitative.*

A. PENDAHULUAN

Sepanjang 2025–2026 Indonesia diwarnai berbagai isu politik. Gelombang demonstrasi melibatkan mahasiswa dan masyarakat (Setiawati, 2025). Polemik dugaan ijazah palsu mantan presiden juga belum tuntas (Roshali, 2026). Selain itu, ribuan siswa dilaporkan mengalami keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG) (Aziz, 2026). Rentetan isu tersebut memunculkan pertanyaan apakah masyarakat, khususnya mahasiswa, masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah.

Grimmelikhuijsen & Knies (2017) mendefinisikan kepercayaan terhadap pemerintah (*trust in government*) sebagai penilaian masyarakat terhadap pemerintah yang didasarkan pada kompetensi, kepedulian, dan integritas. Han & Yan (2019) memandangnya sebagai ekspektasi psikologis yang mencakup sikap dan keyakinan terhadap sistem politik, pemerintah, dan pejabat pemerintah. Kepercayaan ini penting bagi demokrasi dan hubungan warga dengan negara (Mansoor, 2021). Vu (2021) menemukan bahwa semakin tinggi kepercayaan terhadap pemerintah, semakin besar kemungkinan masyarakat mematuhi kebijakan yang dibuat. Sebaliknya, penurunan kepercayaan dapat mengurangi partisipasi dalam pemilu, meningkatkan dukungan terhadap partai oposisi, dan melemahkan kepatuhan warga (Devine, 2024). Fukasawa *et al.* (2020) menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah berpotensi berdampak pada kesehatan mental dalam jangka panjang. Dari sisi penyebab, transparansi informasi pemerintah berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat (Idris, 2020).

Survei Edelman Trust Barometer 2024 terhadap 33.000 responden di 28 negara menunjukkan bahwa warga di 17 negara tidak memercayai pemerintahnya, sementara Indonesia tergolong tinggi dengan skor 73/100 (Edelman, 2024). Namun, sejumlah gejala di media sosial mengindikasikan hal yang berbeda. Penelitian tentang tagar #KaburAjaDulu, misalnya, menemukan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga publik sebagai salah satu tema dominan di kalangan pemuda Indonesia (Ardianti *et al.*, 2025). Pertanyaannya, bagaimana kepercayaan terhadap pemerintah di era kepemimpinan yang baru ini?

Mahasiswa merupakan kelompok yang strategis untuk ditelaah. Sebagai kelompok terpelajar, mahasiswa kerap dipandang sebagai agen perubahan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah (Rafli, 2026). Peran nyata tersebut tercatat dalam sejarah reformasi 1998 (Supriyanto, 2022). Mahasiswa juga memiliki akses informasi yang tinggi melalui media sosial. Nerista *et al.* (2025) menemukan bahwa 65,9% dari 305 mahasiswa aktif berpartisipasi politik digital melalui protes dan kritik di media sosial. Wahid *et al.* (2025) juga melaporkan bahwa mahasiswa yang sering mengakses berita di media sosial cenderung terlibat aktif dalam kegiatan politik daring. Paparan informasi yang intens ini memungkinkan mahasiswa membentuk persepsi dan penilaian terhadap pemerintah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kepercayaan terhadap pemerintah dari berbagai sudut. Fan *et al.* (2022) menguji secara empiris hubungan antara perilaku manajemen citra pemerintah, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kohesi sosial di Tiongkok dengan teori psikologi sosial, dan menemukan bahwa manajemen citra pemerintah berdampak positif terhadap kepercayaan dan kohesi sosial. Scandurra *et al.* (2023) meneliti kepatuhan terhadap regulasi kesehatan masyarakat pada gelombang kedua pandemi Covid-19. Mereka menemukan bahwa kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi pemerintah berkaitan dengan perilaku protektif yang lebih baik, sedangkan kepercayaan yang lebih rendah berkaitan dengan meningkatnya kecemasan terhadap masa depan, meningkatnya kelelahan, dan menurunnya perilaku protektif. Fahmi (2025) menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi, keamanan data, daya tanggap, dan transparansi memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah, serta menegaskan pentingnya tata kelola sistem digital yang baik untuk menjaga akuntabilitas demokratis dan kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang.

Penelitian terdahulu tentang kepercayaan mahasiswa terhadap pemerintah cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran tingkat kepercayaan, bukan pada pendalaman pengalaman subjektif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan *trust in government* pada mahasiswa dan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari pengalaman mereka terpapar informasi pemerintahan di media sosial. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana gambaran kepercayaan mahasiswa terhadap pemerintah di tengah paparan informasi pemerintahan di media sosial, dan tema-tema apa yang muncul dari pengalaman tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian psikologi sosial tentang kepercayaan terhadap pemerintah; secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. *Trust* dan *Trust in Government*

Trust adalah kondisi psikologis berupa kesediaan menerima kerentanan berdasarkan harapan positif terhadap niat atau perilaku pihak lain (Rousseau *et al.*, 1998). Rousseau *et al.* (1998) membedakan *trust* menjadi tiga jenis, yaitu *calculus-based trust* yang berlandaskan pertimbangan rasional dan pertukaran ekonomi, *relational trust* yang terbentuk melalui interaksi berulang, dan *institutional based trust* yang menjadi fondasi bagi jenis kepercayaan lainnya melalui reputasi dan kebijakan institusi yang adil. *Trust* bersifat dinamis: pengalaman positif maupun negatif memengaruhi perkembangannya, dan ia terbentuk melalui proses pembelajaran ekspektasi berdasarkan pengalaman yang berulang dan konsisten (Bosmans *et al.*, 2019).

Lewicki & Tomlinson (2003) menjelaskan bahwa *trust* berkembang secara bertahap. Pada awalnya kepercayaan berbasis perhitungan (*calculus based*): individu memperkirakan perilaku pihak lain berdasarkan imbalan yang diperoleh dan hambatan yang mencegah perilaku tidak layak dipercaya. Tahap ini dapat berkembang menjadi kepercayaan berbasis identifikasi (*identification-based trust*), ketika kedua pihak, yaitu pemberi kepercayaan (*trustor*) dan pihak yang dipercaya (*trustee*), telah menginternalisasi keinginan masing-masing dan saling memahami hal yang penting bagi pihak lain.

Dalam konteks pemerintahan, *trust in government* mencerminkan pandangan warga terhadap responsivitas, kompetensi, dan keandalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan serta menangani persoalan masyarakat (Ma *et al.*, 2024). Han & Yan (2019) merinci tiga dimensinya: *competence* (pemerintah dinilai mampu, terampil, efektif, dan profesional), *benevolence* (pemerintah dinilai peduli pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat), dan *integrity* (pemerintah dinilai tulus, jujur, dan menepati janji). Dinamika kepercayaan ini dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan sesuai dengan harapan masyarakat (Li *et al.*, 2025).

2. Faktor yang Memengaruhi *Trust in Government*

Li *et al.* (2025) menyebutkan enam faktor yang memengaruhi *trust in government*. Pertama, orientasi kebijakan: kebijakan yang diambil dengan hati-hati meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kedua, kepuasan terhadap kebijakan: semakin puas masyarakat terhadap kebijakan yang dirancang dan dijalankan, semakin tinggi pula kepercayaannya. Ketiga, ekspektasi terhadap kebijakan: keselarasan antara kebijakan dan harapan masyarakat meningkatkan kepercayaan, sedangkan ketidakselarasannya dapat menurunkannya. Keempat, narasi konspirasi, yang meningkatkan persepsi risiko dan memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Kelima, literasi media, yaitu kemampuan memahami dan mengevaluasi informasi agar masyarakat terlindungi dari berita bohong dan narasi konspirasi. Keenam, tata kelola pemerintahan yang adil, yang membuat masyarakat cenderung lebih percaya terhadap pemerintahan yang berlangsung.

3. *Distrust in Government*

Distrust atau ketidakpercayaan tidak sekadar ketiadaan kepercayaan, melainkan sikap yang diekspresikan melalui skeptisisme, kewaspadaan, dan perilaku defensif (Peters & Scharlau, 2025). Peters & Scharlau (2025) menyebut tiga karakteristiknya, yaitu *skepticism*, *wariness*, dan *vigilance*. Skeptisisme didefinisikan sebagai sikap yang meliputi ketidakpercayaan, keraguan, dan penuh pertanyaan (American Psychological Association, 2018). Kewaspadaan berkaitan dengan kepekaan individu terhadap perubahan yang mungkin terjadi (Schie *et al.*, 2021).

4. Mahasiswa dan Peran Sosial-Politiknya

Mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2026). Dalam kehidupan sosial-politik, mahasiswa kerap dipandang sebagai agen perubahan (Rafli, 2026). Mahasiswa juga berperan sebagai pengontrol sosial, yaitu perantara antara masyarakat dan pemerintah yang mengawasi kebijakan (Amri, 2023). Peran lain adalah menjadi penyaring agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik politik yang tidak bermoral (Hendri, 2024). Mahasiswa dipandang sebagai *iron stock*, yaitu calon pemimpin bangsa yang diharapkan memberi manfaat di masa depan, sebagai *moral force* yang menjadi teladan etis, dan sebagai *guardian of value* yang menjaga nilai-nilai luhur bangsa dengan logika ilmiah (Sinaga, 2023). Mahasiswa pun dituntut kritis dan peka terhadap persoalan di sekitarnya (Pasaribu *et al.*, 2024).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berupaya memahami dan mengeksplorasi makna dari suatu permasalahan individu atau sosial (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada tahap awal, peneliti melakukan studi literatur mengenai fenomena banyaknya isu politik di Indonesia, mengumpulkan data awal dari media sosial untuk memperkuat urgensi penelitian, lalu memilih konstruk psikologis yang sesuai dengan fenomena tersebut, yaitu *trust in government*. Pada tahap lanjutan, peneliti mengkaji teori dari penelitian terdahulu, menyusun metode penelitian, menyebarkan kuesioner pertanyaan terbuka kepada mahasiswa, dan mengolah data dengan NVivo. Pada tahap akhir, peneliti menganalisis data hingga diperoleh tema-tema dan menarik kesimpulan.

Partisipan dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan tiga kriteria: (1) berstatus mahasiswa, (2) aktif mengikuti informasi mengenai isu pemerintahan melalui media sosial selama tiga bulan terakhir, dan (3) memiliki pengalaman langsung maupun tidak langsung terkait kebijakan pemerintah. Partisipan direkrut melalui media sosial (TikTok, Instagram, X, dan WhatsApp). Identitas dan seluruh data partisipan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Data dikumpulkan selama dua minggu melalui kuesioner pertanyaan terbuka (*open ended question*) di Google Form, teknik yang sesuai untuk menggali suatu topik secara mendalam (Weller *et al.*, 2018). Kuesioner memuat empat pertanyaan: (1) Bagaimana perasaan Anda ketika melihat berita-berita terkait isu-isu pemerintahan yang banyak beredar saat ini; (2) Dengan banyaknya berita yang beredar terkait pemerintahan saat ini; apakah Anda masih memercayai pemerintah yang menjabat saat ini? Berikan alasannya; (3) Ceritakan bagaimana informasi-informasi negatif pemerintahan memengaruhi kehidupan sehari-hari Anda; (4) Menurut Anda, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi informasi-informasi negatif dari pemerintahan. Selain itu, dikumpulkan data demografis berupa usia, jenis kelamin, domisili, program studi, durasi penggunaan media sosial per hari, dan media sosial yang paling sering menyampaikan informasi pemerintahan.

Data dianalisis dengan analisis tematik, yaitu metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema pada data kualitatif (Braun & Clarke, 2006), dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Analisis dilakukan melalui enam fase yang diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Fase Analisis Tematik

Fase	Kegiatan
Mengenal data (*familiarization*)	Membaca ulang data, mencatat ide awal, dan menyalin data jika diperlukan
Membuat kode awal	Memberi kode secara sistematis pada bagian data yang menarik dan mengelompokkan data yang relevan untuk setiap kode
Mencari tema	Mengelompokkan kode ke dalam tema potensial dan mengumpulkan data yang relevan
Meninjau tema	Memeriksa kesesuaian tema dengan data berkode dan keseluruhan data, lalu memetakannya secara tematik
Mendefinisikan dan menamai tema	Menganalisis tiap tema lebih lanjut, menetapkan definisinya, dan menelaah alur cerita keseluruhan
Menyusun laporan	Memilih kutipan yang jelas dan kuat, menganalisisnya, dan mengaitkan hasil dengan pertanyaan penelitian serta kajian pustaka

Keabsahan data (*trustworthiness*) menunjukkan sejauh mana temuan dapat dipercaya dan benar-benar merepresentasikan pengalaman partisipan, bukan asumsi peneliti. Korstjens & Moser (2018) mengemukakan empat kriteria, yaitu kredibilitas (kebenaran dan keakuratan temuan sesuai realitas perspektif data), transferabilitas (kemungkinan temuan diterapkan pada konteks lain yang relevan), dependabilitas (konsistensi dan keterlacakan proses penelitian dari awal hingga akhir), dan konfirmabilitas (temuan berasal dari data yang benar-benar ada, bukan dari bias atau kepentingan peneliti).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 124 mahasiswa berpartisipasi dalam penelitian ini. Karakteristik partisipan disajikan pada Tabel 2. Usia partisipan berkisar 18–30 tahun, dengan usia 22 tahun paling banyak (42 orang; 33,9%). Mayoritas partisipan adalah perempuan (80,6%) dan berusia 22–23 tahun (48,4%), dengan sebaran domisili yang luas di 16 provinsi dan didominasi Sumatera Barat (34,7%). Sebagian besar partisipan menggunakan media sosial lebih dari enam jam per hari (41,9%) dan paling banyak menerima informasi pemerintahan dari TikTok (39,5%), diikuti Instagram (27,4%) dan X (26,6%).

Tabel 2. Karakteristik Partisipan (N = 124)

Kategori	Karakteristik	n	%
Jenis kelamin	Perempuan	100	80,6
	Laki-laki	24	19,4
Usia	18–19 tahun	12	9,7
	20–21 tahun	41	33,1
	22–23 tahun	60	48,4
	≥ 24 tahun	11	8,9
Domisili	Sumatera Barat	43	34,7
	Jawa Barat	30	24,2
	Jawa Timur	13	10,5
	DKI Jakarta	13	10,5
	12 provinsi lainnya	25	20,2
Durasi media sosial per hari	1–2 jam	4	3,2
	2–3 jam	22	17,7

	3–5 jam	46	37,1
	> 6 jam	52	41,9
Media sosial sumber informasi pemerintahan	TikTok	49	39,5
	Instagram	34	27,4
	X (Twitter)	33	26,6
	WhatsApp	3	2,4
	Threads	2	1,6
	Lainnya	2	1,6
	Facebook	1	0,8

Pada tahap pengkodean pertama diperoleh 225 kode dari jawaban 124 partisipan. Kode-kode yang berkaitan dikelompokkan menjadi *parent node* dan *child node*, sedangkan kode yang seragam digabungkan sehingga tersisa 84 *node*. Dari 84 *node* tersebut muncul tiga tema emergen, yaitu dampak psikologis, kondisi emosional, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah (*distrust in government*) (Tabel 3). Gambar 2 menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam jawaban partisipan, di antaranya "informasi", "berita", "pemerintah", "pemerintahan", "kebijakan", dan "percaya".

Tabel 3. Tema Emergen, Kode, dan Frekuensi Kemunculan

Tema	Kode	Kode Dominan (Frekuensi)
Dampak psikologis	Cemas, gelisah, lelah psikologis, mengganggu produktivitas, sedih, stres, rusak suasana hati	Cemas (49); sedih (15)
Kondisi emosional	Bingung, kecewa, marah, sakit hati, kesal, panik, takut, terkejut	Kesal (28); kecewa (18); marah (16)
Ketidakpercayaan (*distrust*)	Hilang harapan, hilang kepercayaan, krisis kepercayaan, kurang percaya, pesimis, prihatin, ragu, tidak percaya	Tidak percaya (96)



Gambar 1. *Word Cloud* Jawaban Partisipan

Pada tema dampak psikologis, kode yang menyertai adalah cemas, gelisah, lelah psikologis, mengganggu produktivitas, sedih, stres, dan rusak suasana hati; kode cemas paling sering muncul (49 kali). Pada tema kondisi emosional, kode yang menyertai adalah bingung, kecewa, marah, sakit hati, kesal, panik, takut, dan terkejut; kesal menjadi kode

terbanyak (28 kali), diikuti kecewa (18 kali) dan marah (16 kali). Tema ketidakpercayaan diikuti kode hilang harapan, hilang kepercayaan, krisis kepercayaan, kurang percaya, pesimis, prihatin, ragu, dan tidak percaya, dengan "tidak percaya" sebagai kode paling banyak (96 kali). Dari tema ketidakpercayaan muncul pula kewaspadaan, yang mencakup sikap lebih berhati-hati dalam menerima berita dan selektif dalam diskusi (15 referensi), serta upaya memastikan kebenaran berita yang muncul 60 kali dalam jawaban partisipan.

Kecemasan menjadi kode yang paling sering muncul pada tema dampak psikologis (49 kemunculan). Seorang partisipan menyatakan, "Informasi negatif mengenai pemerintahan terkadang membuat saya merasa khawatir dan kurang percaya terhadap kondisi yang sedang terjadi. Saat sering melihat berita tentang korupsi, konflik politik, atau kebijakan yang menuai kritik, saya menjadi lebih cemas terhadap masa depan. Namun, saya berusaha menyaring informasi dari sumber yang terpercaya agar tidak mudah terpengaruh dan tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan fokus." (Responden no. 75). Partisipan lain menyatakan, "Informasi negatif membuat saya lebih sering mengikuti perkembangan berita dan lebih berhati-hati dalam menyaring informasi yang saya terima apalagi saya sering membuka aplikasi TikTok yang mana terkadang berita hoaks banyak tersebar juga, dan terkadang berita berita negatif membuat saya merasa khawatir atau kecewa terhadap kondisi negara apalagi rakyat rakyat kecil yang sudah sulit hidupnya ditambah sulit lagi oleh kebijakan negara. Namun, saya berusaha agar hal itu tidak membuat saya langsung percaya begitu saja atau menjadi terlalu pesimis terhadap berita hoaks." (Responden no. 8). Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kecemasan tidak hanya berpusat pada diri sendiri, tetapi juga pada nasib masyarakat luas. Kecemasan merupakan respons kognitif, afektif, fisiologis, dan perilaku terhadap situasi yang dipersepsikan sebagai ancaman; stimulus yang dinilai mengancam mengaktifkan *primal threat mode* (Beck & Clark, 1997, dalam Crandon *et al.*, 2024). Hasil ini sejalan dengan temuan Scandurra *et al.* (2023) bahwa kepercayaan yang rendah terhadap institusi pemerintah berkaitan dengan meningkatnya kecemasan terhadap masa depan.

Kesedihan muncul sebanyak 15 kali. Seorang partisipan menyatakan "Perasaan saya campur aduk antara sedih, marah, dan bingung karena beritanya selalu negatif maksudnya tidak memihak kepada rakyat bahkan cenderung merugikan" (Responden no. 56). Partisipan lain menuturkan, "Menurut saya karena sekarang banyak sekali berita hal negaatif yang terlihat, terkadang itu membuat perasaan tidak nyaman. Ada rasa sedih karena harapannya hal yang tidak seharusnya terjadi malah terjadi." (Responden no. 100). Kesedihan dapat timbul dari rasa kehilangan yang tak terhindarkan dan perasaan tidak berdaya menghadapi ancaman (Smith *et al.*, 1993, dalam Bird *et al.*, 2025). Zaid *et al.* (2021) memandangnya sebagai emosi dasar yang muncul sebagai respons terhadap peristiwa negatif atau tujuan yang tidak tercapai. Temuan ini selaras dengan León & Trilling (2021) yang menemukan bias emosi negatif, termasuk kesedihan, pada berita politik di media sosial. Kim & Kim (2021) juga mengaitkan perhatian terhadap berita politik dengan rasa takut dan sedih.

Pada tema kondisi emosional, emosi yang paling banyak muncul adalah kesal (28 kali), kecewa (18 kali), dan marah (16 kali). Salah satu partisipan menyatakan, "Saya merasa sudah cukup muak dan kecewa. Hampir setiap hari ada saja berita tentang kebijakan yang menurut saya kurang masuk akal atau kasus-kasus yang membuat masyarakat dirugikan. Lama-kelamaan jadi capek mengikuti berita karena isinya lebih banyak hal negatif daripada kabar yang memberi harapan" (Responden no. 63). Responden lain juga menyatakan hal yang sejalan, yaitu "Jujur aku sebel banget jika melihat berita tentang isu buruk pemerintahan, apalagi berita tentang korupsi yang ga ngotak, jadi pengen pindah negara. Ga adil bgt rasanya liat mereka yg ongkang-ongkang dengan yang pajak rakyat." (Responden no. 85). *Irritability* diartikan sebagai perasaan marah, kesal, dan tidak sabar dalam kehidupan sehari-hari, yang

dapat berupa ledakan emosi sementara (*phasic*) maupun suasana hati mudah marah yang menetap (*tonic*) (Saatchi *et al.*, 2023).

Kekecewaan dan kemarahan partisipan terutama terkait kebijakan yang dinilai tidak masuk akal, kasus korupsi, dan rasa tidak adil ketika pajak rakyat dinikmati pejabat. Dalam konteks kepercayaan terhadap pemerintah, emosi-emosi ini dapat dipahami sebagai hasil penilaian (*appraisal*) yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kepercayaan terbentuk dari penilaian terhadap *ability*, *integrity*, dan *benevolence* (Hamm *et al.*, 2019); dari informasi yang diterima, kemampuan pemerintah dinilai belum sesuai harapan sehingga memunculkan kecemasan, kesedihan, dan kekesalan. Pola ini konsisten dengan temuan Li *et al.* (2025) bahwa ketidakselarasan antara kebijakan dan harapan masyarakat dapat menurunkan kepercayaan.

Ketidakpercayaan menjadi tema yang paling dominan, dengan kode “tidak percaya” muncul 96 kali. Partisipan menyampaikan alasan yang beragam, antara lain kebijakan yang dinilai kurang tepat sasaran, pemerintah yang dinilai kurang responsif terhadap aspirasi publik, dan kinerja pemerintah yang dinilai buruk. Seorang partisipan menyatakan, “Tidak, karena kebijakan yang diambil kerap menggunakan narasi 'mewakili rakyat', padahal kenyataannya banyak masyarakat yang merasa kecewa dan berputus asa atas dampak kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga dinilai kurang responsif terhadap aspirasi publik dan terkesan menghindari bahkan mengalihkan opini masyarakat terhadap kebijakan yang diterbitkan kepada hal lain.” (Responden no. 84). Partisipan lain mengatakan, “dari berita negatif yang saya baca, saya merasa tidak memiliki banyak harapan, bukan terhadap indonesia saja tapi terhadap kehidupan saya pribadi. sehingga sulit bagi saya menemukan semangat untuk beraktivitas” (Responden no. 94) yang menunjukkan hilangnya harapan. Ketidakpercayaan juga dikaitkan langsung dengan media sosial: “Berbagai informasi negatif yang saya terima melalui media sosial menjadikan saya pribadi yang tidak lagi mempercayai pemimpin negara saya sendiri. Melihat dari banyaknya berita yang menunjukkan kinerja ngawur dari pemerintah, membuat saya mulai berpikir untuk menyelamatkan diri saya sendiri.” (Responden no. 122).

Ketidakpercayaan (*distrust*) diekspresikan melalui skeptisisme, kewaspadaan, dan perilaku defensif (Peters & Scharlau, 2025). Roberts *et al.* (2026) menjelaskan bahwa *distrust* tidak terbentuk dari satu pengalaman saja, melainkan dari akumulasi pengalaman negatif yang memengaruhi persepsi individu terhadap pihak lain. Zhu *et al.* (2023) menambahkan bahwa pengalaman negatif membuat kepercayaan lebih rentan menurun. Dalam penelitian ini, banyaknya informasi negatif tentang pemerintah yang diterima mahasiswa tampaknya terakumulasi menjadi ketidakpercayaan. Skeptisisme sendiri dipahami sebagai kecenderungan mempertanyakan klaim yang tidak didukung bukti memadai (Ståhl & van Prooijen, 2018).

Perilaku defensif juga tampak pada seorang partisipan yang sebelumnya aktif mengunggah pernyataan kritis terhadap pemerintah, tetapi kini menjadi khawatir dan lebih berhati-hati, (Responden 111). Dampak lain dari ketidakpercayaan adalah kewaspadaan. Kewaspadaan tampak pada upaya mahasiswa memeriksa kebenaran berita (60 kemunculan), membandingkan berita di berbagai aplikasi, dan mempertimbangkan kemungkinan hoaks. Seorang partisipan menyatakan, “Informasi yang beredar sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu sebelum dipercaya atau disebarkan” (Responden 33). Perilaku ini menunjukkan bahwa paparan berita negatif tidak hanya menimbulkan dampak afektif, tetapi juga mendorong sikap kritis dalam menyaring informasi, yang berkaitan dengan peran literasi media dalam menjaga kepercayaan terhadap pemerintah (Li *et al.*, 2025).

Temuan ini perlu dibaca dalam konteks intensitas penggunaan media sosial partisipan: 41,9% menggunakannya lebih dari enam jam per hari dan 39,5% menerima informasi pemerintahan terutama dari TikTok. Responden 122 secara eksplisit mengaitkan hilangnya

kepercayaannya dengan informasi negatif di media sosial, sedangkan Responden 8 menyebut berita bohong yang tersebar di TikTok sehingga ia berhati-hati menyaring informasi. Mansoor (2021) menunjukkan bahwa kualitas informasi yang disediakan lembaga pemerintah di media sosial berkaitan dengan kepercayaan warga terhadap pemerintah. Dengan demikian, cara pemerintah mengelola dan menyampaikan informasi di media sosial tampak relevan bagi kepercayaan mahasiswa. Keterbukaan informasi yang tinggi cenderung diikuti kepercayaan yang tinggi, dan sebaliknya (Idris, 2020). Daya tanggap dan transparansi dalam layanan publik digital juga memengaruhi kepercayaan (Fahmi, 2025). Partisipan sendiri menilai pemerintah kurang responsif terhadap aspirasi publik (Responden 84). Karena itu, evaluasi terhadap keterbukaan informasi dan respons terhadap aspirasi publik dapat menjadi titik awal untuk memperkuat kepercayaan mahasiswa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Partisipan direkrut secara *purposive* melalui media sosial sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi, dan komposisi partisipan didominasi perempuan (80,6%) serta domisili Sumatera Barat (34,7%). Pengumpulan data melalui kuesioner pertanyaan terbuka juga tidak memungkinkan penggalian lebih lanjut terhadap jawaban partisipan seperti pada wawancara.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap jawaban 124 mahasiswa, penelitian ini menghasilkan tiga tema emergen yang menggambarkan *trust in government* pada mahasiswa, yaitu dampak psikologis, kondisi emosional, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Berita pemerintahan yang beredar di media sosial menimbulkan dampak psikologis berupa kecemasan dan kesedihan, kondisi emosional yang paling sering berupa kekesalan (*irritability*), serta ketidakpercayaan yang disertai kewaspadaan dan skeptisisme. Mahasiswa merespons paparan berita negatif dengan memverifikasi informasi dan lebih selektif dalam menerimanya. Dengan demikian, gambaran *trust in government* pada mahasiswa dalam penelitian ini ditandai oleh kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah, yang dirasakan bersamaan dengan beban psikologis dan emosional akibat paparan informasi negatif di media sosial. Temuan ini bersifat eksploratif dan menggambarkan pengalaman partisipan dalam penelitian ini, sehingga tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh mahasiswa.

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan dan keragaman partisipan serta mengkaji dampak psikologis, kondisi emosional, dan ketidakpercayaan sebagai variabel tersendiri agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Bagi pemerintah, temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi, terutama terkait keterbukaan informasi dan daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

American Psychological Association. (2018). *APA dictionary of psychology*. https://dictionary.apa.org/skepticism

Amri, A. S. (2023). Peran mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat. *JIDeR Journal of Instructional and Development Researches, 3*(1), 29–34. https://doi.org/10.53621/jider.v3i1.102

Ardianti, R., Monique, P. Y., Eka, A. R., Saharuddin, S. H., Humairah, & Latifah. (2025). #KaburAjaDulu: Affective digital activism among Indonesian youth in response to societal and structural crises. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 5*(2), 137–151. https://doi.org/10.51903/fbjkq235

Aziz, D. A. (2026). *4.755 siswa keracunan MBG, serikat guru: Pemerintah abai*. Tempo. https://www.tempo.co/politik/4-755-siswa-keracunan-mbg-serikat-guru-pemerintah-abai-2126723

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2026). *KBBI VI Daring*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/

Bird, L. H., Thomas, E. F., & Wenzel, M. (2025). "No matter what we do, nothing is enough": A qualitative investigation of political despair. *Journal of Community & Applied Social Psychology*. https://doi.org/10.1002/casp.70095

Bosmans, G., Waters, T. E. A., Finet, C., de Winter, S., & Hermans, D. (2019). Trust development as an expectancy-learning process: Testing contingency effects. *PLoS ONE, 14*(12), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225934

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Crandon, T. J., Scott, J. G., Charlson, F. J., & Thomas, H. J. (2024). A theoretical model of climate anxiety and coping. *Discover Psychology*. https://doi.org/10.1007/s44202-024-00212-8

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Devine, D. (2024). Does political trust matter? A meta-analysis on the consequences of trust. *Political Behavior, 46*(4), 2241–2262. https://doi.org/10.1007/s11109-024-09916-y

Edelman. (2024). *2024 Edelman Trust Barometer*. Edelman.

Fahmi, A. R. (2025). Digital public services and citizen trust in government. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 17*(2), 49–60. https://doi.org/10.54783/jv.v17i2.1419

Fan, J., Zheng, H., & Liang, W. (2022). How to enhance government trust and social cohesion: Evidence from China. *Frontiers in Psychology, 13*, 1–6. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.816019

Fukasawa, M., Kawakami, N., Umeda, M., Akiyama, T., Horikoshi, N., Yasumura, S. *et al.* (2020). Long-lasting effects of distrust in government and science on mental health eight years after the Fukushima nuclear power plant disaster. *Social Science & Medicine, 258*. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113108

Grimmelikhuijsen, S., & Knies, E. (2017). Validating a scale for citizen trust in government organizations. *International Review of Administrative Sciences, 83*(3), 583–601. https://doi.org/10.1177/0020852315585950

Hamm, J. A., Smidt, C., & Mayer, R. C. (2019). Understanding the psychological nature and mechanisms of political trust. *PLoS ONE, 14*(5). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215835

Han, G., & Yan, S. (2019). Does food safety risk perception affect the public's trust in their government? An empirical study on a national survey in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 16*(11). https://doi.org/10.3390/ijerph16111874

Hendri, K. R. (2024). Membangun kesadaran mahasiswa sebagai social control melalui pendekatan Rational Emotive Therapy (RET) dalam menangkal terjadinya money politic pada pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Aceh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan), 5*(1), 96–102.

Idris, H. (2020). Transparansi informasi meningkatkan level kepercayaan terhadap laporan kinerja pemerintah. *BIJAC: Bata Ilyas Journal of Accounting, 1*(1), 65–72.

Kim, S., & Kim, Y. (2021). Attention to news media, emotional responses, and policy preferences about public health crisis: The case of fine dust pollution in South Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(24). https://doi.org/10.3390/ijerph182413325

Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. *European Journal of General Practice, 24*(1), 120–124. https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092

León, E. de, & Trilling, D. (2021). A sadness bias in political news sharing? The role of discrete emotions in the engagement and dissemination of political news on Facebook. *Social Media + Society, 7*(4). https://doi.org/10.1177/20563051211059710

Lewicki, R. J., & Tomlinson, E. C. (2003). Trust and trust building. *Beyond Intractability*. https://www.beyondintractability.org/essay/trust_building

Li, N., Zeng, W., Yin, S., & Zhao, L. (2025). How risk communication affects public trust in government: The moderating role of policy expectations. *Frontiers in Public Health, 13*. https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1557786

Ma, Y., Ma, B., Yu, L., Ma, M., & Dong, Y. (2024). Perceived social fairness and trust in government serially mediate the effect of governance quality on subjective well-being. *Scientific Reports, 14*, 1–12. https://doi.org/10.1038/s41598-024-67124-4

Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly, 38*. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597

Nerista, A. N., Mahardhani, A. J., & Sulton. (2025). The effect of social media platform use intensity on students' digital political participation. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies), 9*(3), 252–258. https://doi.org/10.33751/jhss.v9i3.85

Pasaribu, D. M. T., Aulia, F., Amelia, P., & Sarah, S. (2024). Peran mahasiswa dalam mempengaruhi budaya politik dan demokrasi Indonesia. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research, 2*(1), 84–88.

Peters, T. M., & Scharlau, I. (2025). Interacting with fallible AI: Is distrust helpful when receiving AI misclassifications? *Frontiers in Psychology, 16*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1574809

Rafli, T. (2026). Peran pendidikan politik dalam meningkatkan literasi politik mahasiswa di era media digital. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11*(1).

Roberts, A. R., Levine, E. E., & Risen, J. L. (2026). Learning to distrust: One trust experience changes the expected value of trust. *Journal of Experimental Social Psychology, 125*. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2026.104930

Roshali, R. R. (2026). *Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi hampir setahun menggantung, begini jawaban Polda Metro*. Okezone News. https://news.okezone.com/read/2026/04/18/338/3213160/kasus-tudingan-ijazah-palsu-jokowi-hampir-setahun-menggantung-begini-jawaban-polda-metro

Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. *Academy of Management Review, 23*(3), 393–404. https://doi.org/10.5465/AMR.1998.926617

Saatchi, B., Olshansky, E. F., & Fortier, M. A. (2023). Irritability: A concept analysis. *International Journal of Mental Health Nursing*, 1193–1210. https://doi.org/10.1111/inm.13140

Scandurra, C., Bochicchio, V., & Maldonato, N. M. (2023). Why people were less compliant with public health regulations during the second wave of the Covid-19 outbreak: The role of trust in governmental organizations, future anxiety, fatigue, and Covid-19 risk perception. *Current Psychology, 42*, 7403–7413. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02059-x

Schie, M. K. M. van, Lammers, G. J., Fronczek, R., Middelkoop, H. A. M., & Dijk, J. G. van. (2021). Vigilance: Discussion of related concepts and proposal for a definition. *Sleep Medicine, 83*, 175–181. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.04.038

Setiawati, S. (2025). *12 daftar demonstrasi di RI sepanjang 2025, ini tuntutannya*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/research/20250907081017-128-664740/12-daftar-demonstrasi-di-ri-sepanjang-2025-ini-tuntutannya

Sinaga, R. H. (2023). Peranan mahasiswa dalam mengawal konstitusi serta membangun kesadaran dan optimisme politik hukum. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3*(6), 10202–10215.

Ståhl, T., & van Prooijen, J.-W. (2018). Epistemic rationality: Skepticism toward unfounded beliefs requires sufficient cognitive ability and motivation to be rational. *Personality and Individual Differences, 122*, 155–163. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.10.026

Supriyanto. (2022). Gerakan mahasiswa dalam upaya kejatuhan pemerintah Soeharto 1998. *Jurnal Impresi Indonesia, 1*(2), 66–74.

Vu, V. T. (2021). Public trust in government and compliance with policy during COVID-19 pandemic: Empirical evidence. *Public Organization Review*, 779–796. https://doi.org/10.1007/s11115-021-00566-w

Wahid, D. S., Pratamawaty, B. B., & Purwanto. (2025). Pengaruh penggunaan media sosial untuk berita politik terhadap partisipasi politik daring pada mahasiswa Jawa Barat. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 22*(2), 140–160. https://doi.org/10.36451/jisip.v22i2.87

Weller, S. C., Vickers, B., Bernard, H. R., Blackburn, A. M., Borgatti, S., Gravlee, C. C. *et al.* (2018). Open-ended interview questions and saturation. *PLoS ONE, 13*(6).

Zaid, S. M., Hutagalung, F. D., Hamid, H. S. B. A., & Taresh, S. M. (2021). Sadness regulation strategies and measurement: A scoping review. *PLoS ONE, 16*(8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256088

Zhu, J., Yao, Y., & Jiang, S. (2023). Vulnerability or resilience? Examining trust asymmetry from the perspective of risk sources under descriptive versus experiential decision. *Frontiers in Psychology, 14*, 1–12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1207453